

RENDAHNYA REPRESENTASI POLITIK PEREMPUAN DI TINGKAT DESA (STUDI KASUS DI DESA AMPARA'AN)

Mudelli¹, Bagus Imam Faisal², Dian Eka Indriani³, M. Sahid⁴

¹²³⁴Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan STKIP PGRI Bangkalan

Alamat e-mail: mudelli21@gmail.com¹, bagusimam@stkippgri-bkl.ac.id²,

dianindrian79@stkippgri-bkl.ac.id³, sahid@stkippgri-bkl.ac.id⁴

ABSTRACT

This research was conducted with the aim of analyzing and describing the low political representation of women at the village level, especially in Ampara'an Village, Kokop District, Bangkalan Regency, as well as identifying various factors that affect women's involvement in the village political process. This research is motivated by the lack of women's participation in various political activities, such as village deliberations, decision-making processes, and involvement in village government structures. The low participation is influenced by the strong patriarchal culture that develops in society, so that women are often considered to have less important roles in the political realm. In addition, the low level of political awareness, understanding, and education is also the cause of women's limited involvement in village political life. This study uses a qualitative method with a descriptive approach to describe the conditions that occur in the field in depth. The data collection technique was carried out through observation, interviews, and documentation by involving the village head, community leaders, and women of Ampara'an Village as research informants. The data obtained is then analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawn. The results of the study show that women's political involvement in Ampara'an Village is still passive. Women only attend village forums without playing an active role in conveying aspirations or influencing policies. This condition is influenced by internal and external factors, so political education, training, and village government support are needed so that women's participation can increase optimally.

Keywords: Political Representation, Women, Village

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan rendahnya representasi politik perempuan di tingkat desa, khususnya di Desa Ampara'an, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan, serta mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keterlibatan perempuan dalam proses politik desa. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih minimnya partisipasi perempuan dalam berbagai aktivitas politik, seperti musyawarah desa, proses pengambilan keputusan, maupun keterlibatan dalam struktur pemerintahan desa. Rendahnya partisipasi tersebut dipengaruhi oleh kuatnya budaya patriarki yang berkembang di masyarakat, sehingga perempuan sering dianggap kurang memiliki peran penting dalam ranah politik. Selain itu, rendahnya tingkat kesadaran, pemahaman, dan pendidikan politik juga menjadi penyebab terbatasnya keterlibatan perempuan dalam kehidupan politik desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan kondisi yang terjadi di lapangan

secara mendalam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan melibatkan kepala desa, tokoh masyarakat, dan perempuan Desa Ampara'an sebagai informan penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan politik perempuan di Desa Ampara'an masih bersifat pasif. Perempuan hanya hadir dalam forum desa tanpa berperan aktif dalam menyampaikan aspirasi maupun memengaruhi kebijakan. Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, sehingga diperlukan pendidikan politik, pelatihan, serta dukungan pemerintah desa agar partisipasi perempuan dapat meningkat secara optimal.

Kata Kunci: Representasi Politik, Perempuan, Desa

A. Pendahuluan

Politik merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat karena berkaitan langsung dengan proses penentuan kebijakan, pengambilan keputusan, serta pengaturan kepentingan publik yang menyangkut kehidupan masyarakat secara luas (Prof. Miriam Budiardjo, 2008). Dalam sistem demokrasi, setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik tanpa adanya perbedaan berdasarkan jenis kelamin, suku, maupun latar belakang sosial lainnya, termasuk perempuan.

Perempuan berpartisipasi dalam politik tidak hanya melalui pemilihan umum, tetapi juga melalui gerakan sosial, advokasi, dan keterlibatan dalam organisasi kemasyarakatan (Syahri et al., 2025).

Keterlibatan perempuan dalam bidang politik menjadi bagian penting dalam mewujudkan prinsip kesetaraan gender, demokrasi yang adil, serta pembangunan masyarakat yang lebih inklusif. Akan tetapi, pada kenyataannya representasi politik perempuan di Indonesia, terutama pada tingkat desa ampara'an, masih tergolong rendah dan belum berjalan secara maksimal. Perempuan sering kali hanya dilibatkan sebagai pelengkap dalam forum politik tanpa memiliki pengaruh yang kuat dalam proses pengambilan keputusan maupun penyusunan kebijakan Desa Ampara'an.

Data yang di wawancarai di Desa Ampara'an sebagai berikut.

Tabel 1

Daftar Data Yang Di Wawancarai

No	Nama	Jabatan	Usia
1	Hodri,.S.Pd	Kepala desa	43

2	Marhatib	Tokoh masyarakat	57
3	Liyana	Perempuan desa	25

Kondisi rendahnya representasi politik perempuan tersebut juga terlihat di Desa Ampara'an, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan. Dalam kehidupan sosial masyarakat desa, perempuan masih sering dipandang memiliki peran utama di ranah domestik, seperti mengurus rumah tangga dan keluarga, sedangkan urusan politik serta pemerintahan lebih banyak dianggap sebagai tanggung jawab laki-laki. Budaya patriarki yang masih berkembang kuat di lingkungan masyarakat menyebabkan perempuan kurang memiliki keberanian, rasa percaya diri, dan kesempatan untuk menyampaikan pendapat secara terbuka dalam forum-forum desa, seperti musyawarah desa, rapat pemerintahan, maupun kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan politik, keterbatasan wawasan, serta kurangnya dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar juga menjadi faktor yang memengaruhi rendahnya

keterlibatan perempuan dalam proses politik desa.

UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menetapkan kebijakan afirmasi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam dunia politik indonesia pasal 245, keterwakilan perempuan dalam daftar calon. Perempuan memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pembangunan desa karena perempuan lebih dekat dengan berbagai persoalan sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Kehadiran perempuan dalam proses politik diharapkan mampu memberikan pandangan, ide, serta aspirasi yang lebih beragam sehingga kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih adil dan mampu memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, penelitian mengenai rendahnya representasi politik perempuan di Desa Ampara'an perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi keterlibatan perempuan dalam politik desa serta faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus masukan bagi pemerintah desa dan masyarakat dalam meningkatkan

partisipasi politik perempuan di tingkat desa secara lebih aktif dan optimal.

Oleh karena peneliti merumuskan masalah yaitu: bagaimana representasi politik perempuan di Desa Ampara'an rendah?,

Bagaimana fakto-faktor yang mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam proses politik di Desa Ampara'an?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam mengenai rendahnya representasi politik perempuan di Desa Ampara'an, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan. Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin memperoleh gambaran yang lebih rinci mengenai kondisi nyata keterlibatan perempuan dalam kegiatan politik desa serta faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya partisipasi tersebut. Melalui penelitian kualitatif, peneliti dapat memahami fenomena sosial berdasarkan pengalaman, pandangan, dan kondisi yang terjadi langsung di lingkungan masyarakat desa (Zulkhairi et al., 2019).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk melihat bagaimana kondisi partisipasi perempuan dalam kegiatan politik desa, seperti musyawarah desa, rapat, dan proses pengambilan keputusan. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara mendalam kepada kepala desa, tokoh masyarakat, dan perempuan Desa Ampara'an sebagai informan utama penelitian. Wawancara tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai hambatan, pandangan masyarakat, serta faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi keterlibatan perempuan dalam politik desa (Sugiono, 2023).

Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung penelitian berupa foto kegiatan, catatan lapangan, arsip, dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian. Seluruh data yang telah diperoleh kemudian dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan sehingga hasil penelitian dapat disusun secara

sistematis, jelas, dan mudah dipahami.

C. Hasil Penelitian dan

Pembahasan

1. Representasi Politik Perempuan Di Desa Ampara'an Rendah

Keterlibatan perempuan dalam ranah politik formal mencakup lembaga legislatif, eksekutif, maupun posisi pengambil keputusan merupakan inti dari representasi politik perempuan. Kehadiran ini menjadi jembatan agar aspirasi, kepentingan, dan kebutuhan perempuan benar-benar didengar serta diakomodasi dalam setiap proses penyusunan dan penetapan kebijakan publik (Shafira, 2023).

Temuan yang diperoleh melalui penelitian ini secara konsisten menunjukkan bahwa tingkat keterwakilan perempuan dalam ranah politik di Desa Ampara'an masih berada pada posisi yang cukup jauh dari kondisi ideal yang diharapkan dalam sistem demokrasi yang bersifat inklusif dan partisipatif. Berbagai indikator empiris yang ditemukan di lapangan memperkuat kesimpulan tersebut, di antaranya adalah sangat terbatasnya keterlibatan perempuan yang benar-benar aktif dalam kegiatan musyawarah desa, hampir tidak

ditemukannya perempuan yang terlibat secara substantif dalam proses perumusan kebijakan, perencanaan pembangunan, maupun pengambilan keputusan di tingkat desa, serta tidak adanya perempuan yang menempati posisi strategis maupun jabatan penting dalam struktur pemerintahan desa.

Kondisi ini menjadi semakin kontradiktif apabila dikaitkan dengan fakta bahwa secara formal dan prosedural, perempuan sebenarnya telah diberikan ruang, akses, serta kesempatan yang setara untuk hadir dalam berbagai forum resmi desa. Namun demikian, keberadaan ruang formal tersebut pada kenyataannya belum mampu mendorong perempuan untuk menggunakannya secara optimal, efektif, dan berkelanjutan. Permasalahan yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan aspek aksesibilitas semata, tetapi juga mencakup faktor lain seperti kesiapan psikologis individu, tingkat pengetahuan dan literasi politik, serta keberanian perempuan untuk tampil dan berpartisipasi secara aktif dalam forum-forum publik yang selama ini masih didominasi oleh laki-laki (Nasrudin et al., 2025)

Apabila kondisi tersebut dianalisis menggunakan perspektif teori representasi politik, maka dapat disimpulkan bahwa posisi perempuan di Desa Ampara'an saat ini masih berada pada tahap yang oleh para ahli disebut sebagai representasi deskriptif. Representasi deskriptif pada dasarnya hanya menekankan pada keberadaan secara kuantitatif atau kehadiran fisik dalam ruang politik, tanpa mempertimbangkan sejauh mana individu tersebut memiliki pengaruh yang nyata dan signifikan terhadap proses pengambilan keputusan maupun hasil kebijakan yang ditetapkan. Dengan demikian, perempuan memang telah hadir secara formal dalam forum politik desa, namun kehadiran tersebut belum mampu memberikan dampak substantif terhadap arah kebijakan yang dihasilkan. Kondisi ini sangat berbeda dengan konsep representasi substantif, yaitu bentuk keterwakilan yang lebih bermakna karena tidak hanya menekankan aspek kehadiran fisik, tetapi juga mencakup keterlibatan aktif dalam memperjuangkan, menyuarakan, serta membela kepentingan, aspirasi, dan kebutuhan kelompok perempuan dalam setiap proses pengambilan

keputusan (Nurul Asnawiah, 2020). Idealnya, representasi substantif inilah yang menjadi tujuan utama dalam upaya peningkatan partisipasi politik perempuan, namun realitas di Desa Ampara'an menunjukkan bahwa pencapaian tersebut masih berada pada jarak yang cukup jauh dan memerlukan banyak upaya perbaikan.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan kepada perempuan-perempuan yang tinggal di Desa Ampara'an, ditemukan berbagai fakta sosial yang menggambarkan kondisi partisipasi politik perempuan yang masih memprihatinkan. Para informan mengungkapkan bahwa mereka memang sesekali hadir dalam forum musyawarah desa, namun kehadiran tersebut hampir tidak pernah disertai dengan keberanian untuk menyampaikan pendapat, mengemukakan pandangan, maupun mengajukan usulan yang berkaitan dengan kebijakan atau pembangunan desa. Partisipasi yang terjadi cenderung bersifat pasif, simbolis, dan seremonial, di mana perempuan hanya hadir sebagai peserta, duduk, mendengarkan jalannya diskusi, kemudian meninggalkan forum tanpa memberikan kontribusi yang berarti

dalam proses pengambilan keputusan (Luluk Faizah, 2017).

Hambatan utama yang dirasakan berasal dari faktor internal, seperti rasa sungkan yang sangat kuat, rendahnya tingkat kepercayaan diri, serta keterbatasan pengetahuan mengenai mekanisme politik dan tata kelola pemerintahan desa. Temuan ini sejalan dengan teori partisipasi politik yang menegaskan bahwa tingkat pemahaman politik, kesadaran sebagai warga negara, serta rasa percaya diri individu merupakan faktor-faktor penting yang sangat menentukan tingkat keterlibatan seseorang dalam aktivitas politik di lingkungannya (Suhardiyanto & Abraham, 2008).

Selain faktor internal tersebut, terdapat pula faktor eksternal yang memiliki pengaruh signifikan terhadap rendahnya keterlibatan politik perempuan di Desa Ampara'an. Salah satu faktor yang paling dominan adalah adanya dominasi laki-laki dalam berbagai forum politik desa, baik secara jumlah kehadiran maupun dalam hal penguasaan ruang diskusi dan pengambilan keputusan. Situasi ini secara tidak langsung menciptakan tekanan psikologis bagi perempuan, sehingga mereka merasa kurang

memiliki ruang yang aman, kurang memiliki legitimasi, serta cenderung enggan untuk menyampaikan pendapat secara terbuka. Dalam perspektif teori gender, kondisi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan yang tidak terjadi secara alami, melainkan merupakan hasil dari konstruksi sosial dan budaya yang telah terbentuk dalam jangka waktu panjang dan diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat (Nur et al., 2025). Hal ini juga diperkuat oleh pandangan tokoh masyarakat yang menyatakan bahwa nilai-nilai patriarki yang masih kuat telah menciptakan batas tidak terlihat yang membatasi ruang gerak perempuan dalam dunia politik desa.

Jika dilihat secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa permasalahan rendahnya representasi politik perempuan di Desa Ampara'an merupakan fenomena yang bersifat kompleks, multidimensional, dan tidak dapat disederhanakan hanya pada satu faktor penyebab saja. Permasalahan ini merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor yang saling berkaitan dan saling memperkuat satu sama lain, baik faktor internal seperti

rendahnya kepercayaan diri, terbatasnya wawasan politik, serta minimnya akses pendidikan, maupun faktor eksternal seperti kuatnya budaya patriarki, stereotip gender yang masih mengakar dalam masyarakat, kurangnya dukungan dari lingkungan keluarga, serta belum optimalnya kebijakan desa yang responsif terhadap isu-isu gender (Esariti, 2016).

Seluruh faktor tersebut bekerja secara simultan sehingga membentuk kondisi yang sulit diubah hanya melalui pendekatan jangka pendek atau intervensi yang bersifat parsial. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif, berkelanjutan, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, agar perempuan di Desa Ampara'an ke depannya dapat benar-benar hadir secara aktif, memiliki suara yang didengar, serta mampu memberikan pengaruh nyata dalam setiap proses politik dan pembangunan desa (Hana, 2024).

2. Faktor-Faktor Yang

Mempengaruhi Keterlibatan Perempuan Dalam Politik Di Desa Ampara'an

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Ampara'an,

Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan, dapat diketahui bahwa rendahnya tingkat representasi politik perempuan dipengaruhi oleh dua kategori faktor utama, yaitu faktor internal yang berasal dari dalam diri individu perempuan itu sendiri, serta faktor eksternal yang berasal dari lingkungan sosial masyarakat di sekitarnya. Kedua faktor tersebut saling berhubungan, saling memengaruhi, dan membentuk suatu kondisi sosial yang kompleks, sehingga menyebabkan tingkat keterlibatan perempuan dalam kegiatan politik di tingkat desa masih tergolong rendah dan belum berjalan secara optimal sebagaimana yang diharapkan dalam prinsip demokrasi partisipatif.

Dari berbagai temuan yang diperoleh di lapangan, faktor yang paling dominan adalah masih kuatnya budaya patriarki yang berkembang dan mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat desa. Budaya tersebut secara sosial menempatkan laki-laki sebagai pihak yang dianggap memiliki legitimasi yang lebih kuat, kapasitas yang lebih tinggi, serta kewenangan utama dalam memimpin dan mengambil keputusan dalam berbagai aspek kehidupan sosial

maupun pemerintahan. Sementara itu, perempuan lebih sering diarahkan dan diposisikan pada peran-peran domestik yang berkaitan dengan urusan rumah tangga, pengasuhan anak, dan keluarga, sehingga ruang gerak mereka dalam wilayah publik, termasuk dalam ranah politik, menjadi sangat terbatas. Kondisi ini pada akhirnya membentuk persepsi yang keliru di kalangan perempuan bahwa dunia politik bukan merupakan ruang yang tepat atau sesuai bagi mereka, sehingga keterlibatan perempuan dalam forum-forum desa cenderung bersifat pasif, terbatas, dan belum menunjukkan partisipasi yang aktif serta bermakna (Jaya, 2014).

Hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala desa menunjukkan bahwa secara formal dan administratif, perempuan sebenarnya telah diberikan kesempatan yang setara untuk terlibat dalam berbagai kegiatan politik di tingkat desa, termasuk dalam musyawarah desa, rapat-rapat pembangunan, serta forum pengambilan keputusan lainnya. Namun demikian, dalam praktik pelaksanaannya di lapangan, masih ditemukan berbagai hambatan yang menyebabkan keterlibatan perempuan tersebut belum dapat

berjalan secara maksimal, efektif, dan berkelanjutan. Hambatan utama yang teridentifikasi antara lain adalah rendahnya tingkat kepercayaan diri perempuan ketika harus berbicara di depan umum, keterbatasan akses terhadap pendidikan formal maupun pendidikan politik, serta minimnya pemahaman mengenai konsep dasar politik dan mekanisme pemerintahan desa yang berlaku. Kondisi tersebut mengakibatkan perempuan belum mampu berperan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam menyampaikan aspirasi secara terbuka dan sistematis di forum-forum desa. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa tingkat kesadaran perempuan terhadap pentingnya keterlibatan dalam proses pembangunan desa masih perlu ditingkatkan melalui berbagai program pemberdayaan yang terencana, berkelanjutan, dan berorientasi pada penguatan kapasitas individu.

Selain faktor internal, faktor eksternal juga memiliki peran yang sangat signifikan dalam memengaruhi rendahnya tingkat partisipasi politik perempuan di Desa Ampara'an. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat serta perempuan desa, diketahui bahwa dominasi laki-

laki dalam berbagai forum musyawarah desa menjadi salah satu hambatan struktural yang paling menonjol dan berpengaruh. Kondisi tersebut sering kali menimbulkan perasaan kurang nyaman, kurang dihargai, serta terbatasnya ruang bagi perempuan untuk menyampaikan pendapat secara terbuka, percaya diri, dan tanpa tekanan sosial. Selain itu, masih kuatnya stereotip gender yang berkembang di tengah masyarakat, yang menganggap bahwa perempuan kurang mampu, kurang berani, atau kurang kompeten dalam bidang politik, juga turut memperkuat rendahnya keterlibatan perempuan dalam ruang publik. Di samping itu, dukungan dari lingkungan keluarga, terutama dari suami dan anggota keluarga terdekat, juga menjadi faktor penting yang sangat menentukan keberanian perempuan untuk terlibat dalam kegiatan politik di tingkat desa (Hanifa Maulidia, 2021).

Apabila dianalisis menggunakan teori representasi politik yang dikemukakan oleh Hanna Pitkin, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi perempuan di Desa Ampara'an saat ini masih berada pada tahap representasi deskriptif. Artinya, perempuan memang telah hadir

secara formal dalam berbagai forum politik desa, namun kehadiran tersebut belum diikuti oleh pengaruh yang signifikan dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam penentuan arah kebijakan desa.

Sementara itu, bentuk representasi substantif, yaitu keterlibatan aktif perempuan dalam memperjuangkan, menyuarakan, dan membela kepentingan, kebutuhan, serta aspirasi kelompok perempuan secara khusus, masih belum terlihat secara optimal dalam praktiknya. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya strategis yang lebih terarah dan berkelanjutan, seperti peningkatan pendidikan politik bagi perempuan, pelatihan dan penguatan kapasitas perempuan dalam ruang publik, sosialisasi mengenai kesetaraan gender, serta perumusan kebijakan desa yang lebih responsif terhadap isu-isu gender. Dengan demikian, diharapkan ke depan perempuan dapat memiliki tingkat kepercayaan diri yang lebih tinggi, lebih aktif dalam forum-forum publik, serta memperoleh kesempatan yang benar-benar setara dalam berpartisipasi di bidang politik dan pembangunan desa secara

menyeluruh dan berkeadilan(Erwianti & Aprimayanti, 2022).

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai rendahnya tingkat representasi politik perempuan di Desa Ampara'an, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa keterlibatan perempuan dalam arena politik di tingkat desa masih berada pada kategori yang rendah dan belum mampu mencapai bentuk representasi yang bersifat substantif.

Meskipun secara formal perempuan telah diberikan ruang serta kesempatan untuk menghadiri berbagai forum musyawarah desa, namun kehadiran tersebut pada kenyataannya belum diikuti dengan partisipasi yang aktif dan bermakna, terutama dalam hal penyampaian aspirasi, pengajuan pendapat, maupun keterlibatan langsung dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa representasi perempuan yang terjadi masih cenderung berada pada tahap deskriptif, yaitu hanya sebatas kehadiran secara fisik tanpa disertai adanya pengaruh yang signifikan

terhadap arah kebijakan dan hasil keputusan yang ditetapkan di tingkat desa. dua kelompok faktor utama yang saling berkaitan, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup berbagai kondisi yang berasal dari dalam diri perempuan itu sendiri, seperti rendahnya tingkat kepercayaan diri, keterbatasan pengetahuan dan wawasan politik, serta minimnya pemahaman terhadap sistem dan mekanisme pemerintahan desa yang berlaku. Sementara itu, faktor eksternal lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sosial masyarakat, antara lain masih kuatnya budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan dalam ruang publik, dominasi laki-laki dalam forum-forum politik desa, adanya stereotip gender yang membatasi ruang gerak perempuan dalam bidang politik, serta kurangnya dukungan yang diberikan oleh lingkungan keluarga maupun sosial dalam mendorong keterlibatan perempuan di ranah politik desa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Miriam Budiardjo. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*.

Sugiono. (2023). *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*.

JURNAL

Bagus Imam Faisal. (2023). *Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning (Pbl) Terhadap Pemahaman Dan Kemandirian Siswa Mata Pelajaran Ppkn Di Sdn Banyuajuh 2 Kamal*. 08(September).

Erwianti, A., & Aprimayanti, R. (2022). *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan*. 4(2), 226–246.

Esariti, L. (2016). *Determinan Analisis Gender Pada Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan Gender Determined Analysis of Urban Poor Empowerment*. Juli, 2(3),

Hana, A. (2024). *Jurnal Politik Pemberdayaan Perempuan Melalui Pendidikan Politik Di Komunitas Lokal: Studi Kasus Di Desa Jurnal Politik*. 02(02),

Hanifa Maulidia. (2021). *Perempuan dalam kajian sosiologi gender: Konstruksi peran sosial, ruang publik, dan teori feminis*. *Journal*

of Politics and Democracy, 1(1), 71–79.

<https://idereach.com/Journal/index.php/polikrasi>

Jaya, P. (2014). *Konsep Representasi Dalam Diskursus Epistemologis*. *Researchgate.Net*, (May), 1–5. https://www.researchgate.net/profile/Bayu-Wikranta/publication/359337374_Konsep_Representasi_Dalam_Diskursus_Epistemologis/links/623593afd545b77294032d9c/Konsep-Representasi-Dalam-Diskursus-Epistemologis.pdf

Luluk Faizah. (2017). <http://ojs.umsida.ac.id/index.php/jkmp> 217. 5(September),

Nasrudin, R., Solihah, R., & Maulana Aziz, Y. (2025). *Women's Representation in Regional Elections: Gendered Institutions' Perspective on Political Design and Practice Representasi Perempuan Dalam Pilkada: Perspektif Gendered Institutions Terhadap Desain Dan Praktik Politik*. *Journal of Election and Leadership (JOELS)*, 6(2),

Nur, A., Aulia, F., & Syafruddin, A. U. F. (2025). *Relasi Kuasa dan Ketimpangan Gender dalam*

- Pembagian Harta Gono-Gini: Kajian Sosio-Legal Atas Putusan Perceraian Di Indonesia.* 21,
- Nurul Asnawiah. (2020). Nurul Asnawiah Representasi Subtansif di Tidore. *Caraka Prabu*, 4(Analisis representasi subtansif),
- Shafira. (2023). *Perbandingan Kuota Keterwakilan Perempuan Dalam.*
- Suhardiyanto, A., & Abraham, P. (2008). *Partisipasi Politik Perempuan: Studi Perempuan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Jawa Tengah Tahun 2008* Andi Suhardiyanto dan Puji Lestari Jurusan PKn FIS Unnes.
- Syahri, M. S. R. U., Alqadri, B., & Hadi, M. S. (2025). Rendahnya Representasi Perempuan dalam Pencalonan Anggota Legislatif di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Empiricism Journal*, 6(2), 770–786.
<https://doi.org/10.36312/ej.v6i2.2803>
- Zulkhairi, Z., Arneliwati, A., & Nurchayati, S. (2019). Studi Deskriptif Kualitatif: Persepsi Remaja Terhadap Perilaku Menyimpang. *Jurnal Ners Indonesia*, 9(1), 145.
<https://doi.org/10.31258/jni.8.2>